

STUDI PENGUATAN MANAJEMEN **KELOMPOK TANI** DI SULAWESI SELATAN



Ida Rosady

**STUDI PENGUATAN MANAJEMEN
KELOMPOK TANI
DI SULAWESI SELATAN**

Diterbitkan oleh:



**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Balitbangda)
Provinsi Sulawesi Selatan**

STUDI PENGUATAN MANAJEMEN KELOMPOK TANI DI SULAWESI SELATAN

Editor: Ni'mal Lahamang, Rajendra, Hidrawati A. Ala
Sampul : Netty S. Said
Layout : Rajendra
Penyelaras Akhir : Rajendra

Tim Peneliti : Hidrawati A. Ala, Multief Salman, Netty S.Said,
Ida Rosada, Nurliani Karmen

Diterbitkan Oleh :
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Cetakan Pertama, Desember 2006

Hak Cipta @ 2006
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)
Provinsi Sulawesi Selatan

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak atau menyebarkan
sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-979-1007-28-3

KATA PENGANTAR

Keberhasilan sosial dalam penguatan pertanian di tingkat petani ditentukan sesuai dengan prioritas kelembagaan yang merupakan wadah bagi para kelompok tani.

Pemberdayaan kelembagaan petani melalui kelompok tani memudahkan bagi petani dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan usahatani.

Penelitian ini berjudul Studi Penguatan Manajemen Kelompok Tani di Sulawesi Selatan, mengetahui kelembagaan yang perlu mendapatkan prioritas dalam upaya meningkatkan usahatani khususnya padi.

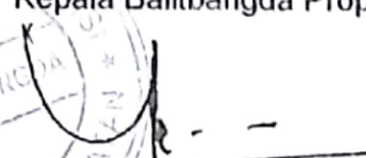
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya penguatan manajemen guna terwujudnya kelompok tani menjadi *agent of changes* di Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian ini, masih banyak kekurangan yang memerlukan penyempurnaan, untuk itu kepada pembaca diharapkan saran dan kritiknya.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Makassar, Desember 2006
Kepala Balitbangda Prop. Sulsel,


Drs. H.A. Sulham Hasan, M.Si
NIP. 580 008 417.
Pangkat: Pembina Utama Madya

ABSTRAK

Kinerja mayoritas kelompok tani saat ini masih rendah yang disebabkan oleh manajemen kelompok tani yang tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, diperlukan penelitian tentang Studi Penguatan Manajemen Kelompok Tani di Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi manajemen kelompok tani, menemukenali faktor-faktor yang dibutuhkan untuk membangun dan menghasilkan model penguatan kelompok tani sehingga dapat berkembang dan mandiri.

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan survei pada kelompok tani tanaman pangan (padi) pada empat kabupaten di Sulawesi Selatan yaitu kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Maros, yang berlangsung selama enam bulan yaitu Juni sampai November 2006. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus atau anggota kelompok tani, PPL dan lembaga mitra dengan menggunakan kuesioner. Data sekunder diperoleh dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan yaitu data jumlah kelas kelompok tani yang ada pada masing-masing kabupaten. Metode analisis yang digunakan dalam mengolah data adalah deskriptif kuantitatif (*Quantitative-descriptive analysis*) yang ditampilkan menggunakan persentase, sedangkan deskriptif kualitatif (*Qualitative-descriptive analysis*) menggunakan metode APPAS (Analisis Perancangan dan Pengembangan Agrosistem) untuk merumuskan suatu model penguatan manajemen kelompok tani.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kelompok tani di Sulawesi Selatan ditinjau dari beberapa aspek yaitu aspek perencanaan, kerjasama, kegiatan belajar mengajar, pemanfaatan fasilitas, inisiatif dan kesepakatan kelompok serta administrasi kelompok. Aspek administrasi dan pemanfaatan fasilitas kelompok tani membutuhkan bimbingan intensif dari Dinas Pertanian, swasta dan perguruan tinggi. Semua faktor yang dibutuhkan dalam penguatan manajemen kelompok tani sangat lemah, utamanya ketersediaan fasilitas penunjang, kemitraan, pemupukan, modal, dan pembentukan lembaga penunjang.

Model penguatan manajemen kelompok tani yang dapat dijadikan acuan adalah model *Bottom-up* yang merupakan model penguatan manajemen yang berkembang/dibangkitkan dari kondisi riil kelompok tani. Model tersebut bersifat fleksibel yang dapat dikembangkan sesuai kondisi kelompok tani di wilayah masing-masing.

Untuk menunjang terbentuknya kelompok tani yang dinamis, pemberian pelatihan tertib administrasi bagi pengurus kelompok tani oleh instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas SDM pengurus, pembentukan gabungan kelompok tani (Gapoktan) menjadi kelompok usaha mandiri di tingkat desa dan kecamatan yang dikoordinir oleh dinas terkait, peran aktif pemerintah dalam memfasilitasi kemitraan kelompok tani dengan lembaga pengadaan saprodi, penyedia modal, dan lembaga pemasaran.

ABSTRACT

Majority of farmer groupss are considered performing very low achievement, which cause by the management of groups's does not work properly. Therefore, it is need a research about Study Empowerment Management of Farmer Groupss in South Sulawesi. The objectives of the research is to identify management of groupss, to find out the factors that needed to build and create a model to empowerment management of the farmer groups, so they could develop self management.

The research was carried out from June to November 2006 in four areas in South Sulawesi namely Bone, Soppeng, Wajo and Maros regency. The primery data was collected by interviewing the member of farmer groups, Field Agriculture Assistent and partnership institution by using questionnaires. While the secondary data namely amount of classification farmer groupss were obtained from the Agriculture and Food Crops Service from each regency. The method that using to analyzed data were *Quantitative Descriptive Analysis*. Which shown in percentage, while *Qualitative-descriptive analysis* by using Agrosistem Development Design Analysis formulate a model of management empowerment of the farmer groupss.

The results showed that the management of the farmer groupss in South Sulawesi observed from several aspects that are planning, cooperation, tachnology transfer, facility usefulness, inisiate and groups agreements as well as administration. Administration and facility usefulness aspect of the farmer groupss need intensive learning from The Agriculture and Food Crops Service, NGO and Univercities. All of the factors that needed in management empowerment of farmer groupss are very low performing, especially avaibility of supporting facility, cooperation, capital investment and formation of supporting institutions.

Management empowerment model of the farmer groups that can be followed is *the Buttom-up* model which is a model of management empowerment that is developed from the real condition of the farmer groups. The model is flexibel and can be developed according to condition of each farmer groups in their location.

To Support a dynamic farmer groups, it will be needed a training of good administration for groups's leader from connected institute to increase human resource. It also need change of a farmer groups assosiation to become a self management businiss in the village which controlled by connected service. And the last, it also need an active participation from the government in fasilitate relationship between the farmer groups and input factor supplier institute, capital supplier/Bank and marketing institute.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SUSUNAN TIM PENELITI	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
D. Manfaat Hasil Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	6
B. Kerangka Pikir	16
C. Definisi Operasional	19
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu	21
B. Populasi dan Sampel	21
C. Indikator/Parameter	23
D. Pendekatan/Bentuk Analisis	23
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kelompok Tani	25
B. Aspek Manajemen Kelompok Tani	28
C. Penguatan Kelompok Tani	50
D. Produksi dan Pemasaran Hasil	63
E. Model Penguatan Manajemen Kelompok Tani	67

BAB V. KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

A. Kesimpulan	78
B. Saran	78
C. Rekomendasi Kebijakan	79
D. Implikasi Kebijakan	79
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sosial dalam penguatan pertanian akhir-akhir ini disadari sebagai faktor yang menentukan keberhasilan adopsi teknologi di tingkat petani. Berbagai permasalahan sosial yang ada, kelembagaan merupakan salah satu faktor yang perlu dicermati untuk mengetahui kelembagaan yang perlu mendapatkan prioritas berkaitan dengan upaya meningkatkan usahatani khususnya padi. Untuk menyikapi hal ini, maka dikembangkan pendekatan pengembangan kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat petani dalam menghadapi berbagai permasalahan dan kebutuhannya. Permasalahan yang ada sulit dihadapi oleh petani secara individu sehingga mereka membutuhkan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan yang dimaksud adalah kelompok tani, kelompok merupakan wadah belajar bersama dimana petani bisa saling bertukar pengalaman, informasi dan pengetahuan.

Peran kelembagaan/organisasi petani antara lain; (1) Penyedia sarana produksi (bibit, obat-obatan, peralatan dan modal), (2) Pembinaan teknis budidaya, (3) Pembinaan/pengelolaan dan pengolahan pasca panen, (4) Pemasaran, (5) Memperjuangkan kepentingan petani dalam berhubungan dengan pihak terkait.

Berdasarkan peran kelembagaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam analisis kelembagaan, penekanannya terletak pada proses interaksi antara dua individu atau lebih yang mencakup tiga kategori yaitu; (1) aturan-aturan/kesepakatan; (2) kinerja dinamika; (3) hasil akhir. Ketiga kategori tersebut digunakan untuk menganalisis eksistensi kelompok tani.

Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan (2005) mencatat bahwa jumlah kelompok tani di Sulawesi Selatan sebanyak 11.541 dengan klasifikasi adalah: kelas Pemula 3.492, kelas Lanjut 5.437; kelas Madya 2.292; dan kelas Utama 320 (Tabel 1). Jumlah kelompok tani berdasarkan kelasnya pada beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Kelompok Tani Berdasarkan Kelasnya di Beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan (2005)

Kabupaten	Kelas Kelompok Tani				
	Pemula	Lanjut	Madya	Ulama	Jumlah
Bone	821	918	431	97	2267
Soppeng	66	113	127	36	342
Wajo	149	382	218	6	755
Sidrap	65	314	249	40	695
Pinrang	180	504	117	7	808
Luwu	135	383	58	0	576
Maros	214	334	59	1	608
Sul-Sel	3.492	5.437	2292	320	11.541

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, 2005.

Kelompok tani dibentuk sebagai wadah komunikasi antar petani, serta antara petani dengan kelembagaan terkait dalam proses alih teknologi. Berdasarkan hasil penelitian Alihamsyah *et al.* (2000); Ananto *et al.* (2000); Pranaji *et al.* (2000), bahwa ada tiga kelembagaan utama yang diperlukan hampir di setiap kegiatan usaha tani padi, yaitu *kelompok tani* sebagai pemegang peran terpenting, diikuti oleh *penyuluh pertanian lapangan (PPL)* dan *jasa alat-alat dan mesin pertanian (alsintan)*.

Berbagai penelitian tentang kelompok tani telah dilakukan dengan tolok ukur yang berbeda-beda. Perbedaan tolok ukur ini mungkin disebabkan peneliti belum mengetahui tolok ukur yang ada, atau telah mengetahui tetapi tidak mungkin menerapkannya karena berbagai keterbatasan. Zakiah *et al.* (2000) telah mengamati dinamika kelompok tani di wilayah Proyek Penguatan Lahan Rawa Terpadu (*Integrated Swamps Development Project = ISDP*) di Riau, Jambi, Palembang dan Kalimantan Barat. Disimpulkan oleh Zakiah *et al.* (2000) bahwa menurunnya dinamika kelompok disebabkan oleh faktor teknis dan faktor sosial. Faktor teknis diantaranya kegagalan panen yang disebabkan antara lain serangan hama dan kondisi air, sedangkan faktor sosial adalah tidak konsistennya realisasi perencanaan yang sudah disepakati. Faktor sosial lainnya, kurangnya kepercayaan anggota terhadap pengurus dalam mengelola modal kelompok.

keberadaan petugas yang dapat membina kelompok dan rendahnya kemampuan untuk menjalin hubungan dengan lembaga lain khususnya koperasi unit desa (KUD). Ditegaskan bahwa hubungan kelompok dengan KUD sangat menentukan dinamika kelompok. Kelompok yang semula sudah mencapai jenjang utama, setelah KUD-nya tidak aktif lagi, dinamikanya menurun (kasus Bunga Raya-Riau), sedangkan kelompok yang KUD-nya aktif, dinamikanya makin tinggi (kasus Jati Baru, Riau).

Syam *et al.* (2000) telah melakukan *baseline* survei kelompok tani di 13 Propinsi di Indonesia dengan tolok ukur yang meliputi: (1) usia kelompok; (2) jumlah anggota kelompok; (3) struktur organisasi; (4) hamparan; (5) tingkatan kelompok. Temuan penting dari penelitian tersebut adalah bahwa usia kelompok ternyata tidak menjamin kinerja kelompok. Kelompok yang sudah mencapai tingkat madya dan berusia tua dinilai sudah tidak dinamis lagi malah mengarah ke kelompok yang tidak efektif. Petani juga menyadari kenyataan ini dan melaporkan bahwa umumnya semangat anggota kelompok tidak stabil, pada awalnya sangat bersemangat namun kemudian sedikit demi sedikit menurun. Di Sumatera Utara petani menyatakan bahwa mereka mau berkumpul hanya jika ada insentif (Hartati dan Wahyuni 2001).

Jumlah anggota kelompok tani sangat bervariasi dan ada kecenderungan bahwa makin banyak anggota kelompok makin rendah persentase keaktifannya dalam pertemuan kelompok. Disimpulkan bahwa jumlah anggota kelompok yang ideal adalah 30-40 orang (Wahyuni dan Hendayana 2001).

Struktur organisasi kelompok umumnya hanya terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara, namun di Jawa Timur (Wahyuni dan Hendayana 2001) ada pula kelompok yang mempunyai seksi pemasaran dan permodalan yang ternyata menunjukkan majunya kelompok tersebut. Temuan di Jawa Timur ini didukung oleh Syam *et al.* (2000) yang melaporkan bahwa struktur kelompok yang hanya terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara menunjukkan kinerja yang rendah.

Syam *et al.* (2000) serta Wahyuni dan Hendayana (2001) melaporkan bahwa luas lahan kelompok tani bervariasi, namun petani cenderung memiliki status yang sama, yaitu sebagai penyewa atau penggarap. Status tersebut

merupakan salah satu penyebab petani sulit untuk mengambil keputusan dalam kegiatan usaha tani, yang akhirnya mempengaruhi keikutsertaannya dalam anggota kelompok tani dan adopsi teknologi.

Menurut Wahyuni dan Hendayana (2001), aset kelompok tani yang utama adalah uang, kemudian gudang yang sekaligus berfungsi sebagai tempat pertemuan kelompok dan terakhir alsintan. Aset yang dimiliki kelompok merupakan cermin kemajuan kelompok dan berfungsi sebagai faktor pengikat anggota. Namun untuk mencapai aset yang tinggi diperlukan pengurus yang bisa dipercaya.

Menurut Pranaji dan Sumarga (2000), seorang pemimpin kelompok sangat besar pengaruhnya terhadap daya saing kelompok tani. Aset alsintan menempati urutan terakhir karena walaupun kelompok tidak memiliki alsintan, anggota masih bisa meminjamnya dari petani lain yang lebih mampu. Pengetahuan petani umumnya hanya terbatas pada budidaya tanaman karena materi tersebutlah yang paling sering disuluhkan. Penyuluhan/bimbingan tentang aspek lain seperti pemasaran hasil, agribisnis dan koperasi sangat diperlukan.

Dari hasil temuan yang telah dikemukakan diperoleh gambaran bahwa kinerja mayoritas kelompok tani masih rendah dan memerlukan bimbingan. Hal ini disebabkan 40% kelompok tani masih pada tingkatan pemula (Wahyuni dan Hendayana, 2001). Berbagai usaha untuk meningkatkan kinerja kelompok telah dilakukan dengan hasil yang bervariasi.

Di Sulawesi Selatan, untuk sektor pertanian tanaman pangan, hal yang tidak kalah pentingnya untuk mendapatkan perhatian serius dari pemerintah adalah kelembagaan pertanian agar dapat diberdayakan. Tanaman pangan di Sulawesi Selatan umumnya pertanian rakyat dengan ciri pertanian gurem. Oleh sebab itu, maka pendekatan pembangunan harus memandang pertanian sebagai pertanian massal (melibatkan banyak orang). Dengan demikian kelompok tani yang telah terbentuk sejak lama perlu mendapat perhatian dan pemberdayaan dari pemerintah. Kelompok tani yang ada sekarang ini diperlukan peningkatan pemberdayaan anggotanya. Untuk memberdayakan petani melalui kelompoknya perlu diteliti kondisi kelompok tani untuk mencari model terbaik dalam memfungsikannya demi kepentingan para petani. Dari pengalaman kegagalan dan

keberhasilan yang pernah ditorehkan, maka dapat dipetik suatu pendekatan atau metode pemberdayaan yang mampu mendorong peningkatan kinerja.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka permasalahan dirumuskan:

1. Bagaimana kondisi aktual manajemen kelompok tani di Sulawesi Selatan?
2. Faktor-faktor apa yang dibutuhkan untuk membangun penguatan manajemen kelompok tani?
3. Bagaimana model penguatan manajemen kelompok tani yang dapat diterapkan di Sulawesi Selatan?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah:

1. Mengidentifikasi manajemen kelompok tani yang ada di Sulawesi Selatan;
2. Menemukenali faktor-faktor yang dibutuhkan untuk membangun penguatan manajemen kelompok tani;
3. Menghasilkan model penguatan manajemen kelompok tani yang dapat diterapkan di Sulawesi Selatan sehingga dapat berkembang dan mandiri.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Sumber informasi bagi pemerintah daerah tentang kondisi aktual manajemen kelompok tani di Sulawesi Selatan;
2. Acuan dalam upaya penguatan manajemen kelompok tani.
3. Acuan dalam upaya mewujudkan kelompok tani menjadi *agent of changes* di wilayah pedesaan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kelembagaan Kelompok Tani

Kelembagaan adalah pola perilaku manusia yang sudah mapan (Yandianto, 1997), namun pengertian kelembagaan juga dapat dipandang sebagai suatu institut. Institut menunjukkan pada kelembagaan formal misalnya organisasi, badan dan yayasan mulai dari tingkat keluarga, rukun keluarga, desa sampai pusat. Disamping itu kelembagaan dapat bermakna sebagai institusi yaitu suatu kumpulan norma-norma atau nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya (Wariso, 1998). Dari pengertian kelembagaan tersebut, maka yang dimaksud dengan kelembagaan dalam sistem usahatani adalah kelembagaan formal dan institusi/norma-norma yang berkaitan dengan semua tahapan kegiatan dalam usahatani, dimulai dari persiapan lahan sampai pemasaran hasil.

Terdapat tiga kelembagaan utama yang diperlukan hampir disetiap kegiatan usahatani yaitu Kelompok Tani, sebagai pemegang peran terpenting, diikuti oleh PPL dan jasa Alsintan. Peranan penting dari kelompok tani mulai dari penentuan jenis komoditas yang akan ditanam sampai pada penentuan waktu dan cara panen. Pentingnya kelompok tani tersebut didukung oleh banyaknya jumlah kelompok tani di Indonesia yang mencapai 2.548.989 kelompok (Pusat Penyuluhan Pertanian, 2001).

Untuk dapat menjalankan suatu aktivitas yang secara ekonomi menguntungkan, diperlukan suatu bentuk atau organisasi kerja sama yang dapat mendorong masyarakat mampu mengembangkan respon yang sesuai dengan kondisi atau iklim ekonomi yang kondusif. Banyak pakar yang mengemukakan betapa pentingnya usaha-usaha pertanian di Indonesia dilaksanakan secara berkelompok. Beberapa argumen pentingnya kelembagaan kelompok tani, antara lain adalah: (1) memudahkan dalam transfer teknologi; (2) meningkatkan efisiensi dalam mendapatkan sarana produksi; (3) meningkatkan efisiensi dalam penjualan

hasil; dan (4) memudahkan dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan pertanian. Adanya kelompok tani yang dinamis dapat meningkatkan kemampuan mengelola yang berkaitan dengan pengaturan pola tanam komoditas yang diusahakan, pengaturan air, pengelolaan kredit, serta pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil secara bersama. Pada dasarnya, untuk mengatasi permasalahan tersebut memerlukan aksi kolektif.

Kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan dengan maksud sebagai wadah komunikasi antar petani, serta antara petani dengan kelembagaan terkait dalam proses alih teknologi. Surat keputusan tersebut dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan atau tolak ukur untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja kelompok tani yang selanjutnya menentukan tingkat kemampuan kelompok tani. Fungsi dari kelompok tani dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) *Sebagai kelas belajar-mengajar.* Kelompok tani merupakan wadah bagi anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) guna mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.
- b) *Sebagai unit produksi.* Usahatani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok, secara keseluruhan dipandang sebagai satu unit produksi, sehingga dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi yang berwawasan agribisnis. Dengan demikian pengadaan sarana produksi, penerapan berbagai inovasi, pengolahan dan pemasaran hasil dapat dilaksanakan dengan biaya yang lebih murah, serta harga produksi yang lebih tinggi, sehingga keuntungan usahatani yang diperoleh meningkat. Dengan kerjasama seperti tersebut di atas, usahatani anggota kelompok dapat terus dikembangkan dan pengelolaan sebagai suatu unit usaha, juga dapat ditingkatkan, sehingga kelompok tani tersebut akan berkembang menjadi kelompok usaha.
- c) *Sebagai wahana kerjasama.* Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara petani dalam kelompok dan antar kelompok serta dengan pihak lain untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan, serta menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Dalam hal ini kelompok tani perlu membangun hubungan melembaga dengan koperasi,